

SENIN

17 JANUARI 2011  
EDISI NO. 3418  
TAHUN X  
48 HALAMAN  
RP 3.000  
(LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM)

PENYANYI  
'ANDA AKU GAYUS'  
DITEROR AKAN  
DIBUNUH

BERITA UTAMA »A2

DPR Dituding Bohongi Publik NASIONAL »A5

KONSEP PRESIDEN  
SOAL GREATER JAKARTA  
DIANGGAP MENYESATKAN

BERITA UTAMA »A2

SI PELARI PAGI  
DI AWAL  
DINOSAURUS

ILMU & TEKNOLOGI »A12 | A13



# KORAN TEMPO



www.tempointeraktif.com

www.korantempo.com

## PEMERINTAH: STOP APBD UNTUK KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL

**PSSI mengaku tidak ada masalah.**

JAKARTA — Pemerintah setuju menghentikan suntikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk klub sepak bola profesional.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, Liga Primer Indonesia bisa menjadi salah satu alternatif acuan kompetisi sepak bola profesional yang mandiri. "LPI memperkenalkan *scientific sport* yang lebih terukur dan tepat," katanya di Jakarta kemarin.

Namun, Velix menegaskan, penghentian kucuran dana APBD itu tak bisa dilakukan serta-merta. "Pemerintah butuh setidaknya dua tahun untuk mengevaluasi dan membuat kerangka regulasi pengelolaan dana APBD," katanya. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi yang diprakarsai oleh Save Our Soccer di Jakarta kemarin. Dalam masa transisi itu, pemerintah akan mengatur ihwal kapan kebijakan "Stop APBD" ini diberlakukan serta memetakan daerah mana yang sudah punya sponsor dan yang belum.

Untuk memotong arus duit APBD ke klub bola, komunitas Save Our Soccer mendesak Kementerian Dalam Negeri agar mencabut Surat Edaran Mendagri No. 426 Tahun 2010, yang memungkinkan dana APBD digunakan membiayai klub profesional. "Mendanai klub profesional bukan bagian dari urusan pemerintah," ujar Abdullah Dahlan, peneliti Indonesia Corruption Watch, yang tergabung dalam Save Our Soccer.

M. Nadjib Koesaeri, pengurus klub Pelita Jaya Karawang, Jawa Barat, mendukung penghentian kucuran APBD tersebut. "Gara-gara klub didanai pos APBD dan yang mengurusnya figur-figur berlatar belakang politisi, akhirnya tidak maju-maju," katanya.

Namun sikap sebaliknya disampaikan Nur Muhyar, juru bicara Persik Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, kata dia, klubnya belum memiliki skema anggaran selain dari APBD. "Klub ini memang didesain untuk dibiayai pemerintah."

Direktur Badan Liga Indonesia Andi Darussalam Tabusalla menyatakan siap menghadapi kemungkinan tersebut. "Ba-

gaimana membuat klub peserta LSI (Liga Super Indonesia) *survive* akan menjadi kajian kami," katanya. Ia mengakui selama dua tahun lalu (2007-2009), klub-klub sepak bola di bawah naungan lembaganya bisa bertahan walau tak boleh menggunakan dana APBD. "Jadi tidak ada masalah."

● ISMA SAVITRI | RINA WIDIASTUTI | HARI TRI WASONO |  
NANANG SUTISNA | DWI WIYANA



### DUIT RAKYAT UNTUK SEPAK BOLA

Penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk klub sepak bola sempat dilarang dengan SK Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007. Tapi larangan itu dicabut dengan Surat Edaran Mendagri No. 426 Tahun 2010.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bulan lalu mengatakan penyaluran APBD untuk klub sepak bola sah asalkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia. Menurut Direktur Badan Liga Indonesia Andi Darussalam Tabusalla, dari 15 peserta Liga Super Indonesia, hanya Persib Bandung, Arema Indonesia, Pelita Jaya, dan Semen Padang yang tidak lagi menggunakan dana APBD.

Berikut ini dana APBD untuk beberapa klub sepak bola pada musim kompetisi 2010/2011.

#### KLUB LIGA SUPER INDONESIA

Persija Jakarta	Rp 25 miliar
PSPS Pekanbaru	Rp 15 miliar
Persiba Balikpapan	Rp 24 miliar
Sriwijaya FC	Rp 25 miliar
Persela Lamongan	Rp 11 miliar
Persisam Putra Samarinda	Rp 15 miliar
Bontang FC	Rp 16 miliar

#### KLUB DIVISI UTAMA

Persik Kediri	Rp 7,5 miliar
PSIS Semarang	Rp 5 miliar
PSMS Medan	Rp 6 miliar
Persikab Kabupaten Bandung	Rp 5 miliar
Persipasi Kota Bekasi	Rp 10 miliar

NASKAH: HARI TRI WASONO | SUJATMIKO | HAMLUDDIN | NUJRDIN

ILUSTRASI: MACHFOED GEMBONG (TEMPO)  
DIOLAH BERDASARKAN FOTO: ADITIA NOVIANSYAH (TEMPO)